



2023 LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

**Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan III Tahun 2023 disusun sebagai salah satu wujud implementasi penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat analisis pencapaian kinerja



dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan III tahun 2023 sebagai upaya pencapaian kinerja yang diemban oleh Ditjen PDSPKP.

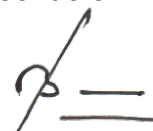
Secara garis besar pencapaian kinerja periode Triwulan III tahun 2023 tergambar dalam capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 96,62. Berdasarkan nilai tersebut, kinerja Ditjen PDSPKP selama periode Triwulan III tahun 2023 berada dalam kategori Kinerja Baik.

Ditengah dinamisnya kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun di tingkat global yang menjadi tantangan dalam proses pencapaian kinerja pada triwulan III tahun 2023, Ditjen PDSPKP senantiasa berupaya untuk mengatasi setiap tantangan yang ada agar setiap tugas yang diamanahkan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan setiap pemangku kepentingan.

Akhir Kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang ditetapkan kepada kami, serta sebagai pendorong peningkatan Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP di masa mendatang.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Direktur Jenderal PDSPKP



Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 24 indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator kinerja utama (IKU) dan 13 indikator kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen PDSPKP.

Dari 24 indikator kinerja tersebut, sebanyak 5 indikator kinerja dapat dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diperoleh 3 indikator kinerja telah mencapai target dan 2 indikator kinerja belum mencapai target Triwulan III tahun 2023. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2023 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerja adalah sebesar 96,62%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Dari 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 17 indikator kinerja bersifat tahunan, 2 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 5 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Adapun 17 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan (setara utuh segar), (3) Kinerja Logistik Hasil Perikanan, (4) Nilai PNBPK Ditjen PDSPKP, (5) Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP, (6) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (7) Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (10) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (11) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (12) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (13) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (14) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP, (15) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP, (16) Tingkat Kepatuhan

- Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP, serta (17) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.
3. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
 4. Sedangkan 5 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Perikanan, (2) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (3) Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP, dan (5) Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
 5. Terdapat 2 indikator kinerja belum mencapai target Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 84,54% terhadap target Triwulan III Tahun 2023, dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program dengan persentase capaian 70,83% terhadap target Triwulan III Tahun 2023.

Pada Triwulan III Tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp394.726.271,00. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat Auto Adjustment (AA) dan blokir sebesar Rp51.495.458,00. sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp343.230.613.000,00. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar Rp165.928.008.000. atau setara dengan 42,04% terhadap total pagu anggaran awal atau 48,34% terhadap pagu anggaran pasca AA dan blokir.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragamaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5
E. Permasalahan Utama.....	6
F. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Sasaran Program 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	25
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	25
Sasaran Program 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	31
3. Konsumsi Ikan	31
Sasaran Program 4. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan.....	34
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	34
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan.....	38
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	40
7. Nilai PNBPK Ditjen PDSPKP	45
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.	47
Sasaran 5. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkatkan.....	48
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	48
Sasaran 6. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP.....	51
10. Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP	51
11. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	54
12. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP.....	56
13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	57
14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	60
15. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI	

atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	62
16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP.....	64
17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	66
18. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	69
19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	70
20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	72
21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP	74
22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	75
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP.	77
24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	80
C. Realisasi Anggaran	82
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Permasalahan dan Rekomendasi	86
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022.	87
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023.....	15
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2023.....	18
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	20
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	25
Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan III Tahun 2023	26
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan III Tahun 2023.....	27
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	31
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	35
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan	39
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program.....	41
Tabel 11. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2023	41
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP	46
Tabel 13. Rekapitulasi PNBPN Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan III tahun 2023.....	46
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing KP	47
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	49
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP	52
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP	55
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	56
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	58
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	60
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	63
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	65
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	67
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	69
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	71

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP.....	73
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP	74
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	76
Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP	78
Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	81
Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan III Tahun 2023	83
Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan III Tahun 2023.....	83

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023	5
Gambar 4. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023.....	17
Gambar 5. Pembahasan Utilitas dan VPO Hasil Kelautan dan Perikanan UPI MB Semester I Tahun 2023	22
Gambar 6. Pembahasan Profiling Industri Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar	22
Gambar 7. Perhitungan Data Volume Produk Olahan (VPO)	22
Gambar 8. Penyusunan Pedoman Penghitungan Utilitas UPI Menengah dan Besar	23
Gambar 9. Pembahasan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023 dan 2024	23
Gambar 10. Pembahasan Pendataan Utilitas dan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023	23
Gambar 11. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP sampai TW III Tahun 2023	24
Gambar 12. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	25
Gambar 13. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan III Tahun 2023	26
Gambar 14. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan III Tahun 2023	28
Gambar 15. Penyelenggaraan <i>Indo Fisheries Expo</i>	31
Gambar 16. Keikutsertaan pada <i>World Seafood Shanghai</i>	31
Gambar 17. Kegiatan Kampanye Gemarikan Tahun 2023.....	34
Gambar 18. Kegiatan Pelaksanaan Inmarine dan Bazar KKP.....	34
Gambar 19. Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan III Tahun 2022 - 2023 (Rp Triliun).....	36
Gambar 20. Kegiatan <i>Benchmarking</i> Industri Pengolahan Rumput Laut di Serang, Banten	37
Gambar 21. Kegiatan FGD Peluang Investasi usaha Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi	37
Gambar 22. Kegiatan Promosi Peluang Investasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi	38
Gambar 23. Kegiatan UMKM Expo	38
Gambar 24. <i>Workshop</i> Penyusunan Metadata Indeks Kinerja Logistik Ikan, 24-26 mei 2023 di Bogor	40
Gambar 25. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2023	41
Gambar 26. Koordinasi dan Sinergi Kegiatan dengan BNI, BRI, dan PT PNM Dalam Rangka Peningkatan Akses Pembiayaan	45

Gambar 27. Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan Pelaku Usaha KP, Bimbingan Teknis Kewirausahaan, dan Fasilitasi Akses Pembiayaan.....	45
Gambar 28. Kegiatan Rapat Kerja Teknis TPUKP Tahun 2023	45
Gambar 29. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP.....	49
Gambar 30. Kegiatan Pendampingan Pengumpulan Data Tim NTPHP ke Beberapa Lokasi Kab/Kota Sampel dan Penginputan Data NTPHP	50
Gambar 31. Monitoring Pengisian Data dari Tim NTPHP Daerah Pada Aplikasi NTPHP	50
Gambar 32. Kegiatan Validasi dan Penghitungan NTPHP Semester I Tahun 2023	50
Gambar 33. Expose Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada KKP tanggal 25 - 27 September 2023 di Bogor.....	57
Gambar 34. Sosialisasi Disiplin Pegawai Lingkup Ditjen PDSPKP 23 Agustus 2023.....	59
Gambar 35. Rapat Penjelasan Teknis Sertifikasi Bidang Kelautan dan Perikanan Bagi Pegawai Non ASN lingkup Ditjen PDSPKP 28 Agustus 2023	59
Gambar 36. Pembekalan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Level I tanggal 5 - 6 September 2023.....	60
Gambar 37. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	62
Gambar 38. Kegiatan Pembahasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	66
Gambar 39. Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	68
Gambar 40. Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi	74
Gambar 41. Kegiatan Update Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor.....	75
Gambar 42. Kegiatan RKBMN Tahun 2025	80
Gambar 43. Pertemuan Koordinasi Dengan KPKNL Jakarta II	80
Gambar 44. Kegiatan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP tanggal 6 - 8 September 2023.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran

kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan III Tahun 2023 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengomunikasikan dan menjawab apa yang telah dicapai pada Triwulan III Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

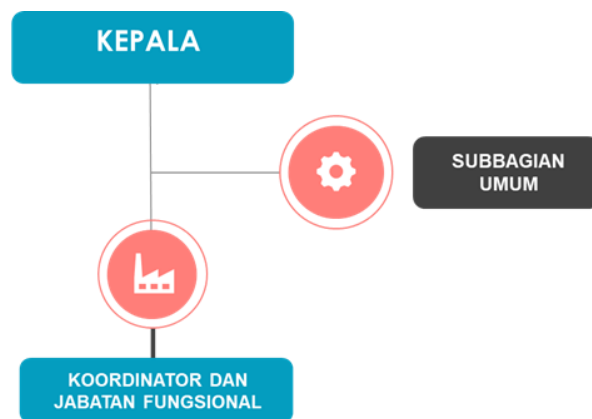
Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

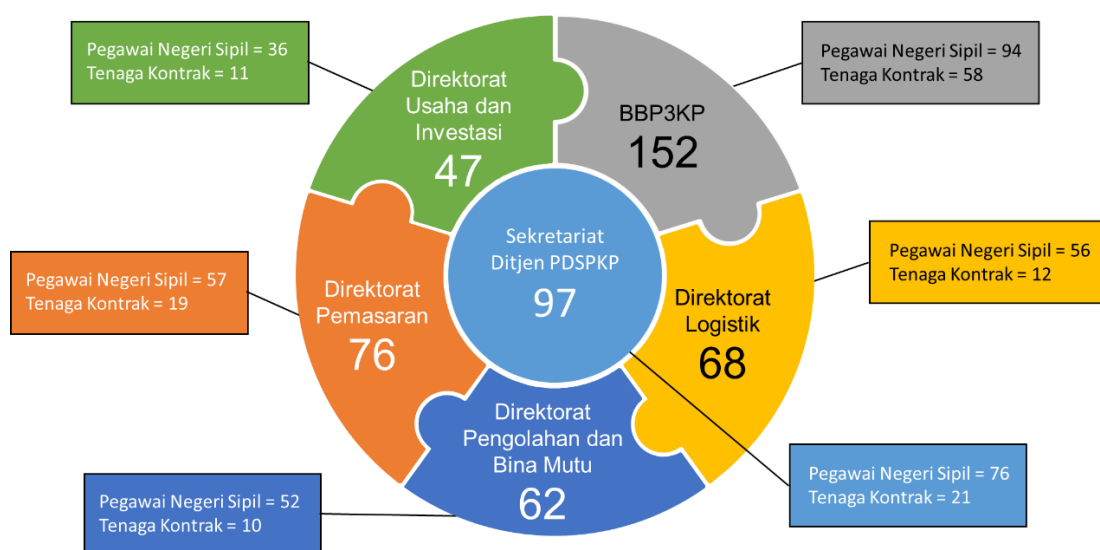
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2 Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2023 mencapai 502 orang, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3 Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2023

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di

Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (*ranking* 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan *IoT system*.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

1. Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
2. Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
3. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
4. Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
5. Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkannya masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klasterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah.
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik.
3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :
 - Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan

modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;

- Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk :
- Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan perusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan terumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.
5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,

yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan.
 - Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor).
3. Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :
 - Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional
4. Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahan kebijakannya adalah :
 - Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat

5. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar
- Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil
- Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah
- Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2022, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61
4	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBK Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600

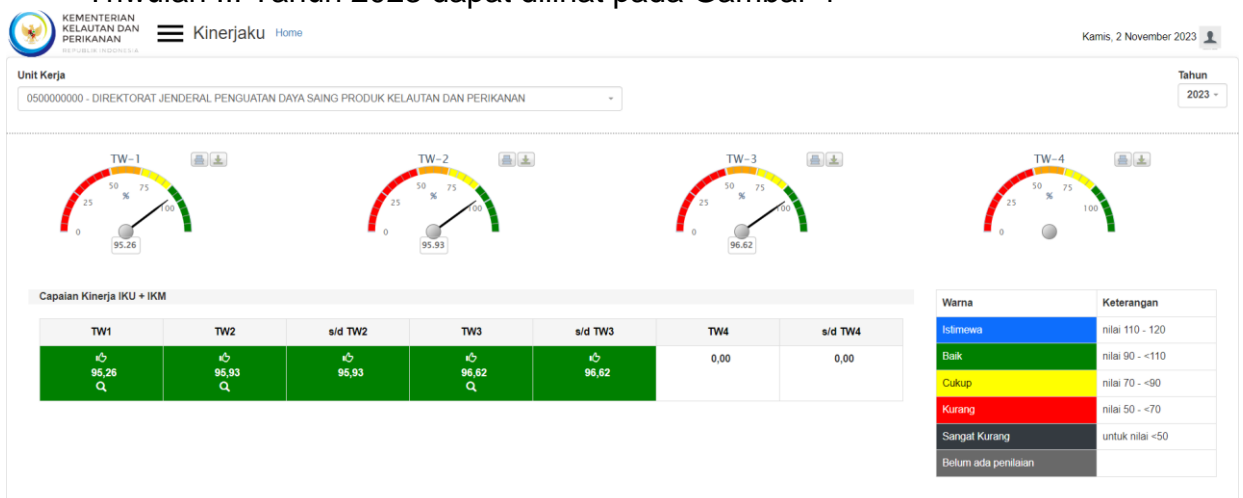
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		16.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		17.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		18.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		19.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
		20.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
24.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Juli sampai dengan September 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4 NKO Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	Persentase terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW III 2023		Tahun 2023	TW III 2023
1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35			
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	4,85	4,10*	84,54
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,5			
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,1	4,88	6,51*	106,72
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58			
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6	7,2	5,10	70,83
7	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65			
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600			
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25			
10	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5			
11	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4			
12	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)*	3,1			
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2			
14	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5			
15	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5			
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	96,33	128,44

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW III 2023	Persentase terhadap Target (%)	
	Tahun 2023	TW III 2023		Tahun 2023	TW III 2023
17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75			
18	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	133,33	144,92
19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89			
20	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86			
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5			
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90			

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk menyerap produksi perikanan dan kedua meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 10 yaitu : (1) Pengalengan, (2) Pembekuan, (3) Penggaraman/ Pengerinan, (4) Pemindangan, (5) Pengasapan/ Pemanggangan, (6) Fermentasi/Peragian, (7) Pereduksian/ Ekstraksi, (8) Pelumatan Daging/ Surimi, (9) Penanganan Produk Segar/Dingin, dan (10) Pengolahan Lainnya.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35	-	7,5	-	-	-	-	-	

Volume produk olahan hasil kelautan dan perikanan berdaya saing ditargetkan sebesar 7,35 juta ton pada tahun 2023. Indikator kinerja dimaksud bersifat tahunan sehingga pencapaiannya tidak dapat dihitung pada triwulan III tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dimaksud, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp7.783.871.369,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi tersebut setara dengan 47,29% terhadap pagu sebesar Rp16.459.380.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Profiling Industri Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar tahun 2023 untuk menghitung utilitas pengolahan hasil perikanan dan mengukur kinerja Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar (UPI MB). Bentuk kegiatan ini adalah asistensi dan pendataan utilitas dan Volume Produk Olahan UPI MB. Pendataan secara menyeluruh terhadap UPI MB mencakup kapasitas terpasang, kapasitas sarana prasarana UPI lainnya, jumlah hari kerja dan shift, volume produk olahan yang dihasilkan dalam negeri dan luar negeri, tujuan negara, dan kendala yang dihadapi UPI MB. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Juli – September 2023 di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB, Sumatera Utara, Bali, dan Kepulauan Riau;
- b. Perubahan SK Dirjen PDSPKP No.1 Tahun 2023 tentang Tim Pendataan Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan anggota tim dengan terbitnya Surat Tugas Tim Kerja Lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor : B.2804/DJPDSPKP/KP.440/VII/2023;
- c. Melaksanakan kegiatan *cleansing* data per jenis olahan dan komoditas sesuai dengan kode HS pada tanggal 5 – 7 Juli 2023. Data tersebut berdasarkan lalu lintas ekspor dan domestik periode Januari sampai dengan Juni 2023;
- d. Penyusunan Buku Pedoman Penghitungan Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Agustus dan 30 Agustus 2023;
- e. Pemantauan progres pendataan profiling UPI MB oleh 36 enumerator provinsi yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan sebagai pengendalian kepada enumerator untuk segera mengirimkan data agar memenuhi target sampling;



Gambar 5 Pembahasan Utilitas dan VPO Hasil Kelautan dan Perikanan UPI MB Semester 1 Tahun 2023



Gambar 6 Pembahasan Profiling Industri Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar



Gambar 7 Perhitungan data Volume Produk Olahan (VPO)



Gambar 8 Penyusunan Pedoman Penghitungan Utilitas UPI Menengah dan Besar



Gambar 9 Pembahasan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2023 dan 2024



Gambar 10 Pembahasan Pendataan Utilitas dan Estimasi Kebutuhan Bahan Baku unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024

- f. Pemberian layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan

daya saing produk olahan. Kegiatan layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 55 produk, sedangkan kegiatan pengujian produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 312 produk.



Gambar 11 Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk KP sampai TW III Tahun 2023

- i. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui dua kegiatan: (a) Pencetakan media informasi berupa *leaflet* (Inkubasi Bisnis dan Profil BBP3KP) dan panel (Layanan Sertifikasi SNI dan Inkubasi Bisnis Invapro KP), (b) Penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi sampai dengan triwulan III dilakukan pada 22 *event* diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan yaitu di Kab. Bandung, Kab. Maluku Tengah, Kota Jakarta, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi, Kab. Cirebon, Kota Batam, Kota Padang, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Banyuwangi, dan Kota Mataram, dengan total penerima informasi sampai dengan bulan September yaitu 929 orang



Kegiatan kampanye Gemarikan di GMB III, KKP



Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan di Mataram



Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi



Penyebarluasan informasi pengujian penerapan hasil perikanan pada kegiatan Pameran INAMARINE 2023



Penyebarluasan Informasi melalui MOBILATI pada kegiatan Bazar KKP



Penyebarluasan media informasi pada Pameran Pangan Plus 2023

Gambar 12 Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Sasaran Program 2. Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Perikanan

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

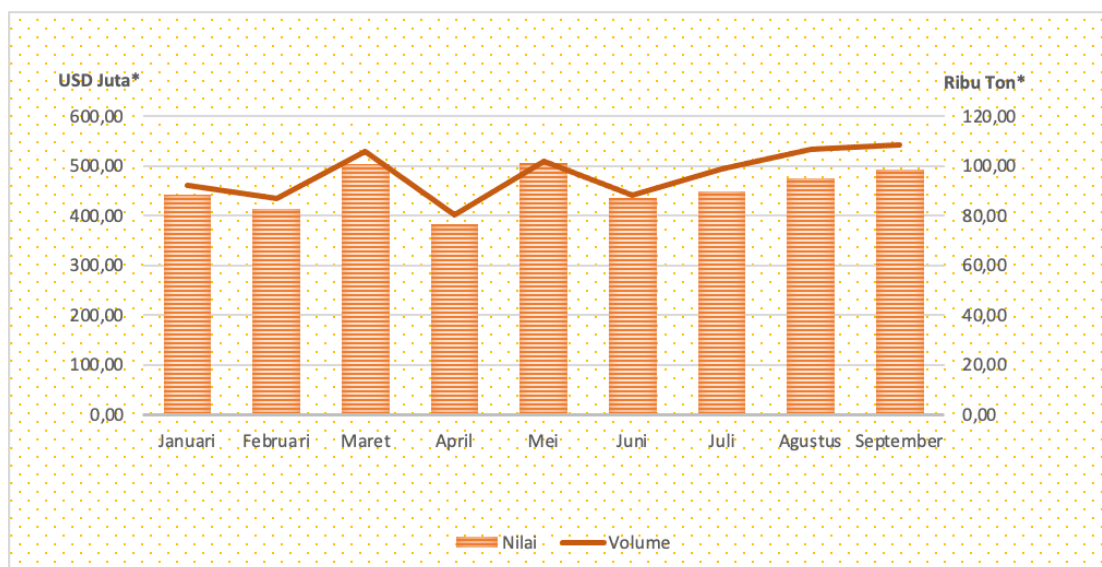
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77	4,85	8	4,10*	60,56	84,54	51,25	4,61	-11,06

*angka sementara s.d Bulan September 2023
Sumber Data: BPS (diolah Ditjen PDSPKP)

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia triwulan III tahun 2023 mencapai USD 4,10 miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 84,54% terhadap target triwulan III tahun 2023 (USD 4,85 miliar) atau 60,56% terhadap target tahun 2023 (USD 6,77 miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 8 miliar), maka capaian ini telah mencapai 51,25%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2022 yakni USD 4,61 miliar, maka capaian triwulan III tahun 2023 turun sebesar 11,06%.

Nilai ekspor hasil perikanan triwulan III tahun 2023 berkontribusi sebesar 2,13% terhadap nilai ekspor nasional triwulan III tahun 2023 sebesar USD 192,27 miliar (angka sementara) atau 2,27% terhadap nilai ekspor non migas triwulan III tahun 2023 yakni sebesar USD 180,48 miliar (angka sementara) (BPS, Oktober 2023).



*angka sementara s.d Bulan September 2023
 Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 13 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Triwulan III Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan nilai dan volume ekspor hasil perikanan Bulan Agustus 2023, maka baik nilai maupun volume ekspor hasil perikanan Bulan September 2023 meningkat sebesar 3,66% dan 1,66%. Namun jika dibandingkan dengan Bulan September 2022, maka nilai ekspor hasil perikanan Bulan September 2023 turun sebesar 4,91% sedangkan volume ekspor naik 5,90%.

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan III Tahun 2023

Jenis Komoditas	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Udang	163.902.764	18,9	1.293.912.325	31,5
Tuna-Tongkol-Cakalang	149.175.094	17,2	688.716.333	16,8
Cumi-Sotong-Gurita	96.768.629	11,1	472.220.397	11,5

Jenis Komoditas	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Rumput Laut	191.627.975	22	356.010.076	8,67
Rajungan-Kepiting	21.883.611	2,52	336.676.572	8,2
Lainnya	623.358.073	28,3	956.458.430	23,3
Total	869.410.378		4.103.994.134	

*angka sementara s.d Bulan September 2023
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

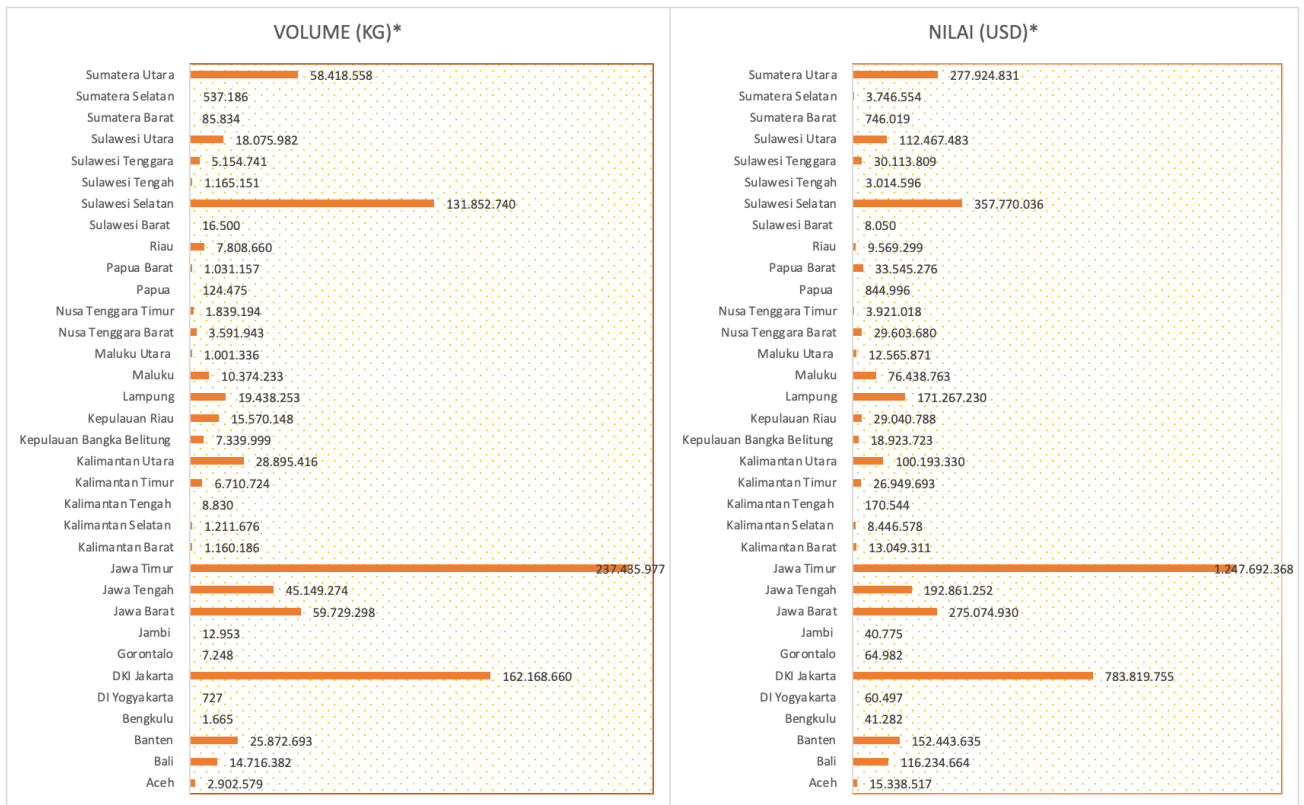
Terdapat 5 jenis komoditas utama ekspor dari Indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, rumput laut, dan rajungan-kepiting. Selain 5 jenis komoditas utama tersebut, terdapat komoditas lainnya meliputi mutiara, tilapia, ikan hias, sarden, kerapu, layur, surimi, hati-telur ikan, dan sebagainya dengan kontribusi 23,31% atau USD 956,46 Juta.

Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan III Tahun 2023

Negara Tujuan	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
United States	160.037.714	18,41	1.427.287.929	34,78
China	304.964.554	35,08	790.064.025	19,25
Japan	85.646.752	9,85	520.646.381	12,69
ASEAN	148.309.954	17,06	480.341.878	11,7
Uni Eropa	41.524.819	4,78	250.909.248	6,11
Timur Tengah	29.252.874	3,36	109.432.219	2,67
Lainnya	99.673.710	11,46	525.312.455	12,8
Total	869.410.378		4.103.994.133	

*angka sementara s.d Bulan September 2023
Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Berdasarkan negara tujuan, nilai ekspor produk perikanan terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar USD 1,43 milyar (34,78%), China sebesar USD 790,06 Juta (19,25%), Jepang sebesar USD 520,65 Juta (12,69%), ASEAN sebesar USD 480,34 Juta (11,70%), Uni Eropa sebesar USD 250,91 Juta (6,11%), dan Timur Tengah sebesar USD 109,43 Juta (2,67%).



*angka sementara s.d Bulan September 2023
 Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 14 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan III Tahun 2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 30,40%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 19,10%, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 8,72%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan triwulan III tahun 2023 antara lain :

- a. Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun;
- b. Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, total nilai impor produk perikanan di Amerika Serikat hingga September 2023 mengalami penurunan sebesar 20,81% dari USD 1,80 miliar pada

tahun 2022 menjadi USD 1,43 miliar pada tahun 2023. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap penurunan impor tersebut dan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat antara lain:

- 1) Udang mengalami penurunan sebesar USD 358,50 Juta (-21,70%) (YoY);
- 2) Rajungan-kepiting mengalami penurunan sebesar USD 39,53 Juta (-15,03%) (YoY);
- 3) Tuna-Cakalang-Tongkol mengalami penurunan sebesar USD 55,43 juta (-25,88%)(YoY);
- 4) Tilapia mengalami penurunan sebesar USD 1,06 juta (-2,91%)(YoY);
- 5) Cumi-Sotong-Gurita mengalami penurunan sebesar USD 2,14 juta (-9,34%) (YoY).

- c. Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT). Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, Chili dan Brazil.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan, antara lain:

- a. Mempercepat proses penanganan hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat melalui penyampaian tanggapan *additional information* kepada pihak US. *Department of State* dan penyampaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi tersebut.
- b. Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan.
- c. Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan eksportasi ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan sebesar

Rp13.540.500.000,00 dan pada triwulan III tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp11.342.250.956,99 Realisasi anggaran ini setara dengan 83,77% terhadap total pagu anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan II Tahun 2023, antara lain:

- a. Penyelenggaraan *Indo Fisheries Expo* dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Juli 2023 di Surabaya, Indonesia. *Indo Fisheries Expo & Forum 2023* adalah pameran perdagangan eksklusif berbasis bisnis ke bisnis (B2B) yang memberikan kesempatan luas untuk memantau perkembangan agrikultur dan perikanan di Indonesia. Acara ini menyajikan beragam produk dan layanan terkait industri peternakan, pakan ternak, produksi susu, agroteknologi, kedokteran hewan, dan perikanan. KKP mendorong UMKM berpotensi ekspor untuk berpartisipasi pada pameran skala internasional sehingga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selama keikutsertaan pada pameran tersebut, UMKM yang difasilitasi KKP berhasil mencatat potensi transaksi sebesar USD 28.000;
- b. Keikutsertaan pada *World Seafood Shanghai (WSS) 2023*. WSS merupakan pameran perikanan yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023 di *Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)*, Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Selama pameran berlangsung, nilai potensi transaksi yang dihasilkan sebesar USD 15,6 juta, melebihi dari target USD 10 juta. Produk-produk yang diminati oleh *buyers* antara lain: udang, tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, kakap merah, kerapu, mahi-mahi, ikan sarden kaleng, ikan tuna kaleng, *ribbon fish*, *crackers*, *spanish mackerel*, *skipjack*, *threadfin fish*, telur ikan terbang dan olahan sambal tuna. Para calon *buyers* potensial antara lain berasal dari: RRT, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Chile dan Irak.



Gambar 15 Penyelenggaraan *Indo Fisheries Expo*



Gambar 16 Keikutsertaan pada *World Seafood Shanghai*

Sasaran Program 3. Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi Ikan merupakan angka konsumsi ikan perkapita secara Nasional (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode satu tahun.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61	-	62,5	-	-	-	-	-	-

Konsumsi ikan tahun 2023 ditargetkan sebesar 57,61kg/kapita. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa

dihitung pada triwulan III tahun 2023. Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Konsumsi Ikan sebesar Rp64.082.132.000,00. dan pada Triwulan III tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp32.331.450.881,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 50,45% terhadap total pagu anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan sebanyak 147 promosi, terdiri dari kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dalam rangka pencegahan *stunting* gizi buruk (124 promosi), *Talkshow* CNBC (1 promosi), *Journalist Fest* (1 promosi), *Nautica Fest* (1 promosi), Bazar Bappenas (1 promosi), Bazar UMKM *Thrive* (1 promosi), Bazar Produk Perikanan KKP (8 promosi), Bazar *Jurnalists Fest* Depok (1 promosi), Pameran IISM Jiexpo (1 promosi), Promosi Media Sosial (6 promosi), Promosi Aplikasi Gemarikan (1 promosi), Pelaksanaan *inamarine* (1 promosi);
- b. Kampanye Gernas BBI dan BBWI dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5 – 6 Agustus 2023 di Taman GOR, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- c. Pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan pasar ikan yang telah dilaksanakan sebanyak 65 lembaga yaitu PIB Kab. Bone Bolango, PIB Kab. Buru, PIB Kota Prabumulih, PIB Kab. Probolinggo, PIB Kab. Aceh Utara, PIB Kota Sorong, PIB Kota Padang, PIB Kab. Kutai Timur, PIB Kab. Maluku Tengah, PIB Kab. Jembrana, PIB Kab. Manggarai Barat, PIB Kab. Banyuwangi, PIB Kab. Sampang, PIB Kab. Lebak, PIB Kab. Mamuju Tengah, PIM Muara Baru Kota Jakarta Utara, Senkul Kab. Garut, Senkul Kab. Sambas, Senkul Kab. Lampung Selatan, PIM Soreang Kab. Bandung, Pasar Ikan Konsumsi Kab. Purbalingga, Senkul Kab. Sabang, Senkul Surabaya, Senkul Kab. Singkawang, Senkul Kab. Prabumulih, Senkul Kab. Pekalongan, Senkul Kota Palembang, Senkul Mataram, Senkul

Manado, Senkul Makassar, Senkul Bengkulu, Senkul Bau-Bau, Senkul Tanggamus, Senkul Sumedang, Senkul Raja Ampat, Senkul Pesisir Selatan, Senkul Sangihe, Senkul Morotai, Senkul Jombang, Senkul Cirebon, Senkul Bulukumba, Senkul Bondowoso, Senkul Belitung, Senkul Bantaeng, Senkul Bangka Selatan, Senkul Aceh Selatan, PIM Palembang, PIB Pinrang, PIB Muna, PIB Sula, PIB Boyolali, Pasar Kuliner dan Sentra Promosi Produk KP Purwakarta, Pasar Ikan Mayangan, Pasar Ikan Bojong, Pasar Ikan Kampong Bajo, PIB Basa Nohi, Pasar Ikan Higienis Kedonganan, Pasar Boyolali, Pasar Gede Hardjonagaro, Pasar Tumenggungan, Pasar Ikan Hias Gedebage, Pasar Pelabuhan Ratu, Sentra Pemasaran Ikan PPN Pelabuhan Ratu, Pasar Ikan Labuan, dan Pasar Ikan Balekambang;

- d. Pengadaan bantuan pemerintah peralatan pemasaran (*coolbox*) dibagi dalam 4 tahap. Progres sampai dengan bulan September 2023 telah kontrak sebanyak 5.324 unit. Tahap I sejumlah 1501 unit *coolbox* sudah proses pembayaran. Tahap II sejumlah 2000 unit diantaranya 637 Unit sudah sampai ke penerima dan 1.363 unit dalam proses distribusi. Tahap III dalam proses produksi dan distribusi serta tahap IV dalam proses produksi;
- e. Pengadaan kendaraan pemasaran alih teknologi informasi. Progres sampai dengan bulan September 2023 sudah kontrak dan proses pengerjaan diperkirakan akan selesai dan dapat diserahkan ke masyarakat pada triwulan IV tahun 2023;
- f. Penyusunan profil pasar dalam negeri hasil kelautan dan perikanan sebanyak 3 (tiga) data, yaitu konsumsi ikan (kg/kapita), buku peta konsumsi dan serapan ikan berdasarkan preferensi konsumen rumah tangga, dan profil pasar dalam negeri untuk komoditas unggulan;
- g. Melaksanakan kegiatan konsolidasi Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Konsolidasi AKI Provinsi DI. Yogyakarta tanggal 11 Agustus 2023;

- h. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan rekapitulasi data angka konsumsi ikan tingkat provinsi tahun 2022 dan selanjutnya dilakukan finalisasi data AKI Nasional tahun 2022 pada tanggal 14 – 16 September 2023 secara *hybrid* di Bandung dan aplikasi *zoom*, dihadiri oleh 34 DKP Provinsi, Ditjen PDSPKP, dan perwakilan lingkup eselon II Ditjen PDSPKP;
- i. Melaksanakan *Workshop* Penghitungan AKI Periode Bulanan Tahun 2023 pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Koordinator Provinsi dan Enumerator Kab/Kota secara *online*.



Gambar 17 Kegiatan Kampanye Gemarikan 2023



Gambar 18 Kegiatan Pelaksanaan Innamarine dan Bazar KKP

Sasaran Program 4. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/

pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Ditjen PDSPKP selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu kampung budidaya, peningkatan produksi udang, dan penangkapan ikan terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

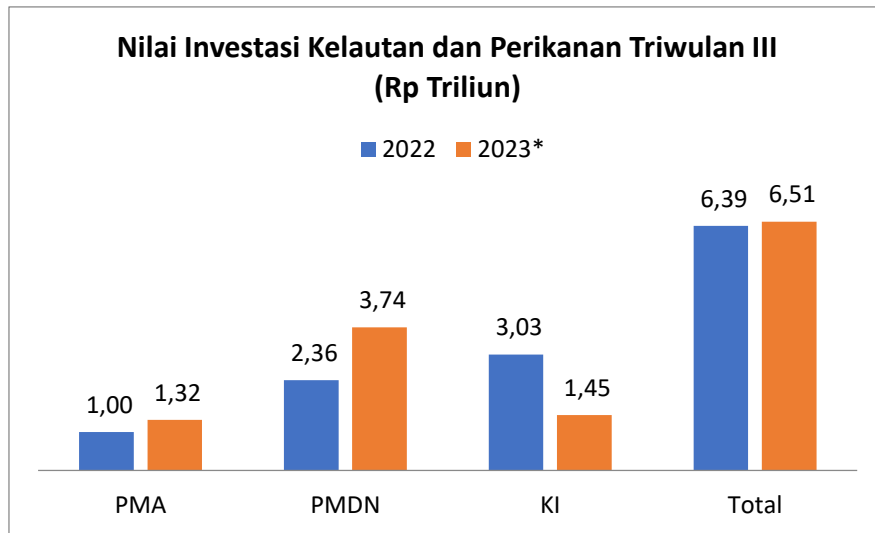
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)	6,1	4,88	6,43	6,51*	106,72	133,40	101,24	5,82	11,86

*angka prognosa

Realisasi nilai investasi KP pada triwulan III tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp6,51 triliun. Capaian ini setara dengan 106,72% terhadap target tahun 2023 yakni Rp6,1 triliun atau setara dengan 133,40% terhadap target triwulan III tahun 2023 sebesar Rp4,88

triliun. Nilai investasi KP pada triwulan III tahun 2023 juga setara 101,24% terhadap target tahun 2024 sebesar Rp6,43 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2022 yakni sebesar Rp5,82 triliun, maka realisasi investasi triwulan III tahun 2023 diperkirakan naik sebesar 11,86%.



*angka prognosa

Gambar 19 Angka Perkiraan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan III Tahun 2022-2023 (Rp Triliun)

Realisasi investasi yang bersumber dari PMA dan PMDN pada triwulan III tahun 2023 mencapai Rp5,06 triliun berdasarkan data prognosa dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau tumbuh 50,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp3,36 triliun. Realisasi Kredit Investasi pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp1,45 triliun berdasarkan data prognosa Otoritas Jasa Keuangan, atau turun 52,19% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp3,03 triliun.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3,491.981.000,00. dan pada Triwulan III tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp2.054.523.181,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 58,84% terhadap total pagu anggaran. Upaya efisiensi dan efektifitas anggaran dan SDM dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan

promosi peluang usaha dan investasi melalui webinar atau *virtual meeting* dan pelaksanaan fungsi pelayanan investasi melalui media *online*.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

- a. Pemetaan peluang investasi
 - 1) *Benchmarking* industri pengolahan rumput laut di Serang, Banten;
 - 2) FGD peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi;
 - 3) Survei lapangan penyusunan dokumen peluang investasi *ready to offer* di Kabupaten Wakatobi;
 - 4) Penyusunan *booklet* peluang investasi usaha 5 komoditas yaitu udang, rumput laut, nila, kepiting dan lobster.
- b. Promosi usaha dan investasi
 - 1) Promosi Peluang Investasi Usaha Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi;
 - 2) Partisipasi pada UMKM Expo di Solo, Jawa Tengah;
 - 3) Fasilitasi Pendampingan Investasi di Kabupaten Wakatobi dan Lampung Selatan;
 - 4) Persiapan Penyelenggaraan *Sail* Teluk Cendrawasih.



Gambar 20 Kegiatan *Benchmarking* Industri Pengolahan Rumput Laut di Serang, Banten



Gambar 21 Kegiatan FGD peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Wakatobi



Gambar 22 Kegiatan Promosi Peluang Investasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi



Gambar 23 Kegiatan UMKM Expo

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan 5 dimensi pembentuk yaitu dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan, dimensi efisiensi, dimensi konektivitas, dimensi manfaat dan dimensi tata kelola. Penghitungan IKLI menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik, dan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Penilaian IKLI tahun 2023 dilakukan pada 6 koridor logistik, yaitu:

1. Bitung – Surabaya/Jakarta;
2. Kupang – Surabaya/Jakarta;
3. Kendari – Surabaya/Jakarta;
4. Mimika – Surabaya/Jakarta;
5. Ambon – Surabaya/Jakarta;
6. Makassar – Surabaya/Jakarta.

Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

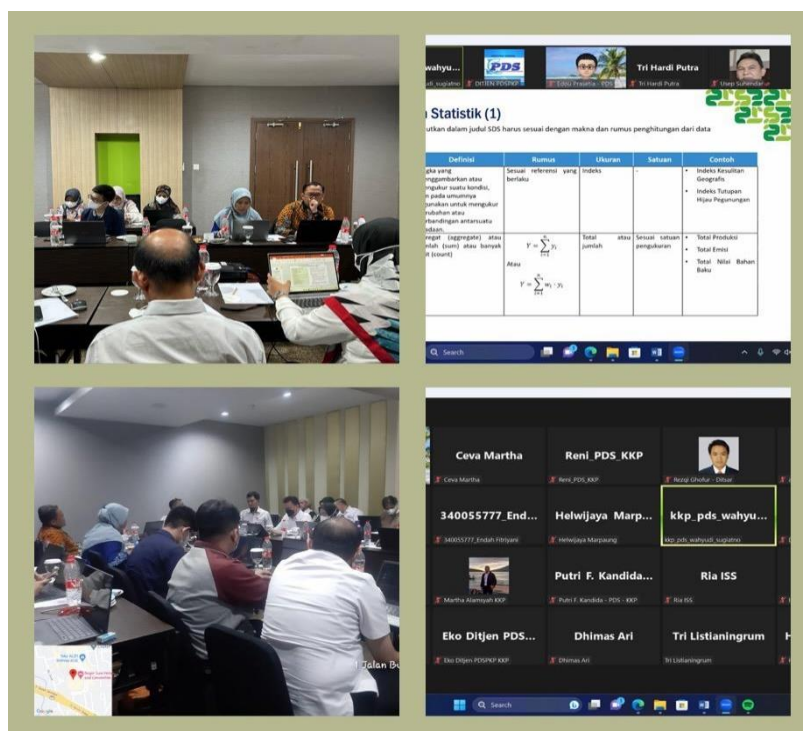
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58	-	60	-	-	-	-	-	-

Kinerja logistik hasil perikanan tahun 2023 ditargetkan sebesar 58. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaian tidak dapat dihitung pada triwulan III tahun 2023.

Alokasi Anggaran untuk kegiatan pencapaian IKLI adalah sebesar Rp68.945.634.000,00. Realisasi sampai dengan TW III adalah sebesar Rp12.373.645.081,00 atau sebesar 17,95% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian IKLI selama TW III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) melalui surat keputusan Nomor: KEP. 627/DJPDSPKP-PPK.2/HK.150/VII/2023 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Honorarium Tim Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan;
2. Pertemuan persiapan survey IKLI Semester I Tahun 2023;
3. Pelaksanaan survey IKLI Semester I Tahun 2023 oleh tim IKLI daerah;
4. *Workshop* pembahasan hasil penghitungan IKLI Semester I Tahun 2023;
5. Pertemuan Pembahasan Metode Pengukuran IKLI Moda Transportasi Darat;
6. Pertemuan Persiapan Penghitungan IKLI Semester 2 dan *Continuous Improvement* Penghitungan IKLI Semester 1 Tahun 2023.



Gambar 24 *Workshop* Penyusunan Metadata Indeks Kinerja Logistik Ikan 24 – 26 Mei 2023 di Bogor

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (nonbank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh *Holding* Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

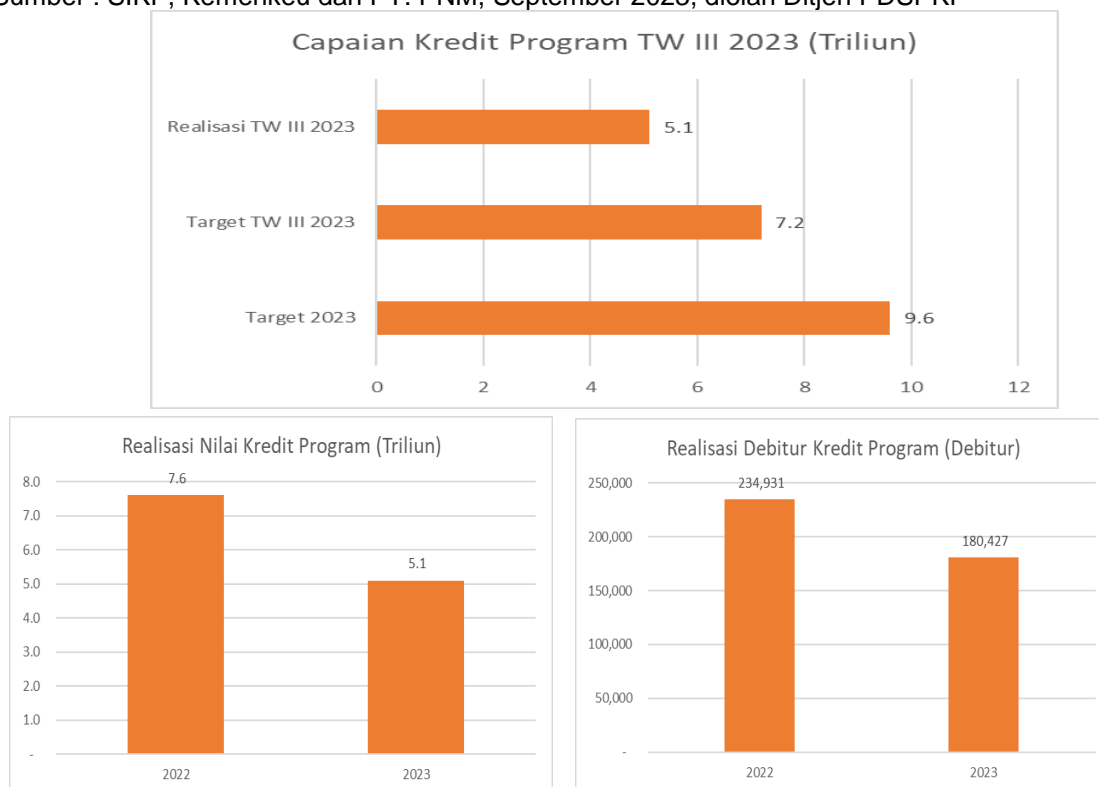
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp Triliun)	9,6	7,2	10,26	5,1	53,13	70,83	49,71	7,61	-32,98

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, September 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Tabel 11 Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2023

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4.621.832.432.533	90.991	90,5
Ultra Mikro (UMi)	481.999.500.000	89.436	9,5
Total	5.103.831.932.533	180.427	100

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, September 2023, diolah Ditjen PDSPKP



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, September 2023, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 25 Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2023

Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan III tahun 2023 mencapai Rp5,1 triliun yang disalurkan kepada 180.427 pelaku usaha KP. Capaian ini setara dengan 70,83% terhadap target triwulan III tahun 2023 sebesar Rp7,2 triliun atau setara dengan 53,13% terhadap target tahun 2023 sebesar Rp9,6 triliun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp10,26 triliun, maka capaian triwulan III tahun 2023 telah mencapai 49,71%. Jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan III tahun 2022, maka capaian pada triwulan III tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 32,98%.

Penurunan realisasi kredit program ini disebabkan oleh perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, Lembaga Keuangan Penyalur KUR perlu melakukan penyesuaian sistem dalam penyaluran pembiayaannya. Adapun perubahan kebijakan dimaksud yaitu:

- a. Kebijakan KUR kembali ke masa sebelum Pandemi Covid 2019, yaitu suku bunga 6% tanpa tambahan subsidi bunga 3%, target penyaluran KUR di sektor produksi (termasuk sektor KP) kembali ditetapkan sebesar 60%, kembalinya total akumulasi plafon KUR Kecil maksimal Rp500 juta, dan memperpanjang kebijakan restrukturisasi KUR s.d. 31 Maret 2024;
- b. Kebijakan KUR mendorong graduasi debitur, dimana terdapat penurunan suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3%, pembatasan maksimal akses KUR Mikro sebanyak 4 kali untuk sektor produksi (termasuk sektor KP), dan kenaikan suku bunga berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang;
- c. Kebijakan KUR untuk memperluas penyaluran dan mendorong peningkatan debitur KUR, diantaranya penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR sampai dengan Rp100 juta dan penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR dengan plafon KUR tahun 2023 sebesar Rp450 Triliun atau plafon sesuai kecukupan APBN 2023;

- d. Berdasarkan hasil evaluasi penyaluran KUR pada semester I 2023 yang mengalami perlambatan, pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan target KUR menjadi Rp297 triliun dari semula sebesar Rp450 triliun atau turun sebesar 34%, dengan tetap memperhatikan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR (Sumber : Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/249/SET.M.EKON.3/07/2023 tanggal 14 Juli 2023);
- e. Realisasi KUR secara nasional pada triwulan III 2023 mencapai Rp185 triliun atau menurun sebesar 35,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp285,1 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi KUR nasional, maka proporsi realisasi KUR sektor KP baru mencapai 2,5%

Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai pembiayaan yaitu melakukan koordinasi dengan Pusdatin, Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian dalam rangka penyediaan data KUSUKA ke dalam sistem informasi kredit program Kemenkeu (SIKP).

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, Ditjen PDSPKP terus melakukan upaya dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III dan juga sebagai tindak lanjut rekomendasi pada Triwulan II antara lain:

- a. Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPUKP melalui fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha (Gisela) turut berkontribusi pada penyaluran kredit program, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan triwulan III 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp28,98 miliar kepada 690 pelaku usaha;
- b. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan di

Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kebumen serta pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI bagi pelaku usaha KP di 25 lokasi;

- c. Kegiatan identifikasi potensi akses pembiayaan dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2023 di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini bertujuan menggali informasi lokasi dan calon debitur potensial untuk pengembangan klaster-klaster pembiayaan di Kabupaten Pekalongan yang menjadi lokus prioritas KKP sebagai Kampung Perikanan Budidaya Nila Salin. Adapun informasi yang diidentifikasi meliputi: a) Komoditas unggulan; b) Potensi dan sebaran pelaku usaha sektor KP; c) Jenis Usaha eksisting; d) Permasalahan serta kendala yang dihadapi; e) Potensi akses pembiayaan yang tersedia; dan f) Dokumentasi lokasi.
- d. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BNI pada tanggal 25 Juli 2023, Bank BRI pada tanggal 25 Agustus 2023, dan PT. PNM pada tanggal 23 Agustus 2023, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data KUSUKA KKP. Adapun hal-hal yang dibahas adalah rencana sinergi kegiatan pengembangan klasterisasi usaha kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemitraan yang didukung dengan penyediaan akses pembiayaan dan edukasi bagi UMKM binaan Ditjen PDS yang siap ekspor melalui program BNI Xpora;
- e. Rapat Kerja Teknis Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) 2023 dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Agustus 2023 di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja TPU KP semester I dan perencanaan kegiatan semester II 2023, peningkatan pemahaman TPU KP tentang program prioritas KKP, dan meningkatkan *softskill* TPU KP dalam pendampingan usaha.

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan

melalui Kredit Program sebesar Rp7.964.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp4.721.793.062,00 atau setara dengan 59,29%.



Gambar 26 Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan BNI, BRI dan PT. PNM dalam rangka peningkatan akses pembiayaan



Gambar 27 Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan pelaku usaha KP, Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Fasilitasi Akses Pembiayaan



Gambar 28 Kegiatan Rapat Kerja Teknis TPUKP Tahun 2023

7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 12 Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp Miliar)	8,63	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, nilai PNBP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar Rp8,63 Miliar. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dilakukan pengukuran pada triwulan III tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Berdasarkan Aplikasi Omspan Kemenkeu diketahui terdapat capaian nilai PNBP sampai dengan Triwulan III sebesar Rp7.146.227.801,00 yang bersumber dari :

Tabel 13. Rekapitulasi PNBP Ditjen PDSPKP Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

No	Kode Akun Jenis Pendapatan	Realisasi
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.324.230.755
2	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	151.498.323
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.528.763.033
4	425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	705.432.085
5	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	214.208.018
6	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	99.626.217
7	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	336.118.634
8	425289 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	95.110.000
9	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	591.272.136
10	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	99.968.600
Total		7.146.227.801

Pada tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PNBP Ditjen PDSPKP antara lain :

- a. Pembahasan penerapan SPIP PNBP pada CS 1000 Ton tanggal 27 Juli 2023;
- b. Evaluasi Pengelolaan PNBP dan Tata Kelola Perizinan Tahun 2023 pada Setditjen PDSPKP tanggal 15 Agustus 2023;
- c. Finalisasi Usulan Penggunaan Kembali Dana PNBP Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- d. Reviu atas Usulan Kegiatan Penggunaan PNBP Lingkup Ditjen PDSPKP TA. 2023 tanggal 6 September 2023;
- e. Rapat Revisi Petunjuk Pelaksanaan Nomor 27 Tahun 2021 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tanggal 19 September 2023.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik dibidang logistik hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tenaga kerja yang terlibat bidang PDSPKP ditargetkan sebesar 49.600 orang. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak dihitung pada triwulan III tahun 2023.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sasaran 5. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 29 Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Nilai)	104,25	-	104,75	-	-	-	-	-	-

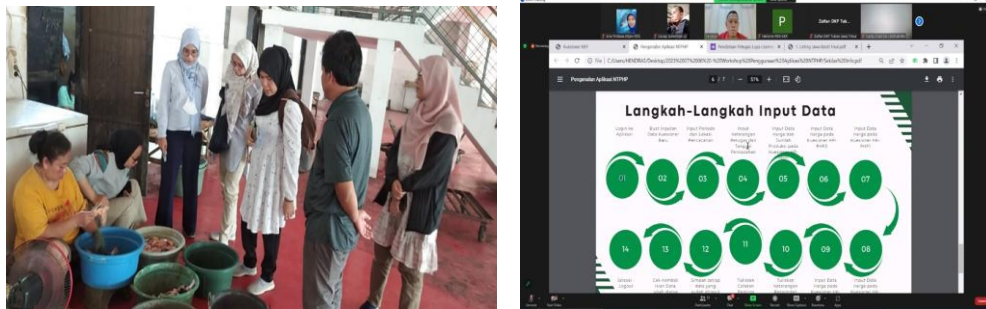
Target Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) tahun 2023 adalah sebesar 104,25. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya tidak diukur pada triwulan III tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.282.351.194,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 24,37% terhadap pagu anggaran sebesar Rp38.083.040.000

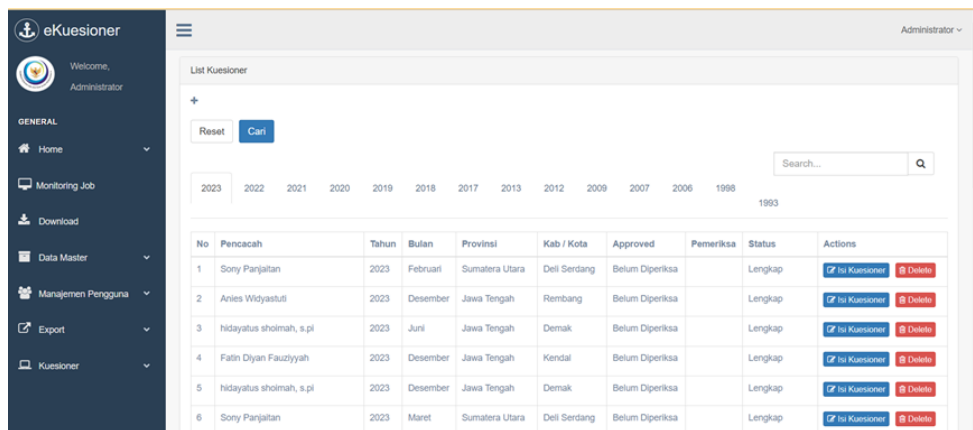
Pada Triwulan III tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Telah melaksanakan kegiatan pendampingan pengumpulan data, monitoring penginputan data, validasi dan verifikasi data terhadap tim NTPHP daerah sampling;

- b. Telah melaksanakan kegiatan validasi dan perhitungan NTPHP sementara Semester I Tahun 2023 tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat;
- c. Telah melaksanakan verifikasi lapang dan sinkronisasi data listing NTPHP di Kabupaten Kendal, Pekalongan, Sidoarjo, Tulungagung, Takalar, dan Bulukumba periode Agustus – September 2023.



Gambar 30 Kegiatan Pendampingan Pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel dan Penginputan Data NTPHP



Gambar 31. Monitoring Pengisian data dari Tim NTPHP Daerah pada Aplikasi NTPHP



Gambar 32. Kegiatan Validasi dan Penghitungan NTPHP Semester I Tahun 2023

Sasaran 6. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Deregulasi Kebijakan; (3) Penataan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan SDM Aparatur; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) *Quick Wins*.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen PDSPKP sebagai salah satu unit kerja eselon I yang membidangi daya saing produk kelautan dan perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	33,5	-	34	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, nilai PMPRB lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 33,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diukur pada triwulan III tahun 2023. Penilaian indikator kinerja ini akan dilakukan Kementerian PAN dan RB atau Inspektorat Jenderal KKP jika tidak ada penilaian dari Kementerian PAN dan RB.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai lingkup Ditjen PDSPKP selama bulan Juli sampai dengan September 2023. Apel Pagi lingkup Ditjen PDSPKP pada tiap bulannya dipimpin oleh Direktur Jenderal PDSPKP yang diikuti oleh seluruh pegawai lingkup Ditjen PDSPKP dengan arahan yang berfokus pada isu-isu strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Sedangkan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit kerja eselon II dilaksanakan setiap minggu dan dipimpin oleh Pejabat Eselon II;
- b. Melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada tanggal 5 – 6 Juli 2023. Penilaian dilakukan terhadap 9 dari 10 layanan publik lingkup Ditjen PDSPKP;
- c. Melaksanakan kegiatan Uraian Fungsi Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 17 Juli 2023;
- d. Telah disusun Surat Tugas Tim Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri KP No. 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian

- Kelautan dan Perikanan setelah proses validasi tahap selanjutnya adalah penyusunan surat penugasan (ketua dan/atau anggota);
- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP pada tanggal 31 Juli 2023;
 - f. Pembahasan Proses Bisnis Logistik, Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 Agustus 2023.;
 - g. Melakukan Identifikasi Jabatan yang mengalami perubahan kelas jabatan dan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - h. Rapat validasi evaluasi jabatan JF Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 25 Agustus 2023;
 - i. Penyusunan Usulan Evaluasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 September 2023;
 - j. Pembahasan Finalisasi Usulan Proses Bisnis, Uraian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 7 September 2023;
 - k. Rapat Penyusunan Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 September 2023;
 - l. Rapat Pembahasan Pendahuluan Finalisasi Proses Bisnis Ditjen PDSPKP pada tanggal 25 September 2023;
 - m. Rapat Pembahasan Usulan Peta Proses Bisnis dan Uraian Tugas Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 September 2023;
 - n. Rapat Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 29 September 2023;
 - o. Keikutsertaan pada kegiatan identifikasi dan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 3 - 4 Juli 2023;

- p. Keikutsertaan pada Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri KP Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan pada tanggal 12 - 14 Juli 2023;
- q. Keikutsertaan pada Rapat Penyesuaian Format Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan SKM Periode Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023 pada tanggal 23 Agustus 2023;
- r. Menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Reviu Rancangan Perubahan Road Map RB KKP Tahun 2020 - 2023 pada tanggal 28 Agustus 2023;
- s. Menghadiri penyusunan pemutakhiran nomenklatur terkait Urusan Kelautan dan Perikanan KKP Tahun 2024 pada tanggal 11 - 12 Agustus 2023;
- t. Menghadiri kegiatan uji petik evaluasi mandiri implementasi pelayanan publik pada BBP3KP tahun 2023 pada tanggal 6 September 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp94.843.524.000 dan telah terealisasi sebesar Rp61.825.458.957,00, hal ini setara dengan 65,19% sampai Triwulan III Tahun 2023.

11. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 serta memenuhi syarat lain sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021

tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi minimal 60% pada area pembangunan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja Berpredikat menuju WBK Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit Kerja)	4	-	2	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 4 unit kerja. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan pada akhir tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Direktorat Pemasaran telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023;
- b. Rapat Persiapan Penilaian Tim Penilaian Internal (TPI) Direktorat Pemasaran pada tanggal 3 Agustus 2023;

- c. Rapat Persiapan Penilaian Tim Penilaian Internal (TPI) Direktorat Pemasaran pada tanggal 14 Agustus 2023;
- d. Menghadiri *review* Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Pemasaran Tahun 2023 dan *updating* Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta bukti dukung pada Area Penataan Tata Laksana pada tanggal 18 Agustus 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp714.217.674,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 70,49% terhadap pagu anggaran sebesar Rp.1.013.228.000,00

12. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 3,1.

Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan III tahun 2023.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP pada periode Mei sampai dengan Agustus 2023. Penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b. Keikutsertaan pada *entry meeting* evaluasi atas penilaian maturitas SPIP pada KKP tahun 2023;
- c. Expose Evaluasi atas penilaian Maturitas SPIP KKP kepada tim evaluator BPKP pada tanggal 25 - 27 September 2023 di Bogor, Jawa Barat;



Gambar 33 Expose Evaluasi atas penilaian Maturitas SPIP pada KKP tanggal 25 – 27 September 2023 di Bogor

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp774.337.023,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 75,81% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.021.389.000,00.

13. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2	-	76	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 83,2. Indikator kinerja ini bersifat semesteran, sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan III.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II pada tanggal 11 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023;
- Finalisasi Formulir Kertas Kerja Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka Monitoring Kinerja Pejabat Fungsional tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2023;
- Penyusunan Soal untuk Pemenuhan Materi Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2023;
- Rapat Pembahasan Optimalisasi PPPK 2022 dan Rencana Pengadaan PPPK 2023 pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Sosialisasi Disiplin Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Agustus 2023;

- f. Pelantikan Jabatan Fungsional dan Sumpah Pegawai pada tanggal 25 Agustus 2023;
- g. Kegiatan Validasi Evaluasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tanggal 25 Agustus 2023;
- h. Rapat Penjelasan Teknis Sertifikasi Bidang Kelautan dan Perikanan bagi Pegawai Non ASN lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 28 Agustus 2023;
- i. Sertifikasi Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan bagi Pegawai Non PNS lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 31 Agustus 2023;
- j. Pembekalan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Level I pada tanggal 5 sampai dengan 6 September 2023;
- k. Sosialisasi Organisasi Profesi Bagi Jabatan Fungsional lingkup Ditjen PDSPKP dalam rangka Pengembangan Jabatan Fungsional pada tanggal 11 September 2023;



**Gambar 34. Sosialisasi Disiplin Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP
23 Agustus 2023**



**Gambar 35 Rapat Penjelasan Teknis Sertifikasi Bidang Kelautan
dan Perikanan bagi Pegawai Non ASN lingkup Ditjen
PDSPKP tanggal 28 Agustus 2023**



Gambar 36 Pembekalan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Level I tanggal 5 – 6 September 2023

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.960.615.767,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 82,16% terhadap pagu anggaran sebesar Rp2.386.262.000,00.

14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5	-	84,75	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, nilai PMSAKIP Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga belum

dinilai di triwulan III tahun 2023. Penilaian atas PMSAKIP Ditjen PDSPKP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melakukan reuiu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks *cascading* lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 3 Juli 2023;
- b. Telah dilakukan penilaian Mandiri SAKIP level I Ditjen PDSPKP oleh Inspektorat Jenderal KKP pada periode Juli 2023;
- c. Melakukan Pembahasan revisi renstra dan pohon kinerja tematik pada tanggal 13 Juli 2023;
- d. Pembahasan revisi Rencana Strategis (Renstra) serta adanya rencana penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023. Kegiatan dimaksud melibatkan Biro perencanaan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian PPN/Bappenas;
- e. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) sebagai data dukung keterlibatan pimpinan dalam penilaian aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;
- f. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Eselon I lingkup KKP, serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;

- g. Melaksanakan verifikasi dan validasi PMSAKIP level II yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 24 – 25 Juli 2023 di Bogor;
- h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 12 – 14 September 2023 di Bali. Kegiatan dimaksud melibatkan Direktorat SPPEPP Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan.



Gambar 37 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3.310.486.781,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 57,08% terhadap pagu anggaran sebesar Rp5.799.615.000,00

15. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	-	≤1	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar ≤0,5%. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum ada surat resmi terkait nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP Tahun 2022 sehingga capaiannya belum bisa dihitung.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan lingkup Ditjen PDSPKP periode semester I tahun 2023 tanggal 12 – 15 Juli 2023 di Bandung;
- b. Melaksanakan pembahasan tindaklanjut CHR Itjen atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Periode Semester I Tahun 2023 berupa penyelesaian ketidaksesuaian akun belanja persediaan yang diserahkan ke masyarakat tanggal 17 – 18 Juli 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong;
- c. Keikutsertaan dalam Penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN lingkup KKP Periode Semester I tahun 2023 pada tanggal 20 – 22 Juli 2023 di Bogor;
- d. Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi pencatatan data realisasi persediaan dan aset tetap sampai dengan bulan Juli 2023 lingkup satker pusat tanggal 10 – 11 Agustus 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong;

- e. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi LK dan LBMN periode Juli TA. 2023 Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Agustus 2023 secara *online*;
- f. Melaksanakan kegiatan Monev dan Asistensi Perbaikan Data SAKTI Modul Pelaporan Periode Bulan Agustus seluruh satker Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP 12 – 13 September 2023 melalui *Online*;
- d. Keikutsertaan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi LK dan LBMN periode Agustus TA.2023 Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 29 September 2023 di Wisma Gracilaria, Jakarta.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.356.771.654,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 75,57% terhadap pagu anggaran sebesar Rp3.118.616.000,00

16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75	75	80	92,86	123,81	123,81	116,08	96,77	-4,02

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 96,77%. Capaian ini setara dengan 123,81% terhadap target Triwulan III dan Target tahun 2023 yaitu 75%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 96,77%, maka capaian triwulan III tahun 2023 turun sebesar 4,02%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 116,08%.

Pada triwulan III 2023, Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 September 2023 dan 29 – 30 September 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong. Terdapat 17 rekomendasi berstatus proses dan 30 rekomendasi berstatus pending. Terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan triwulan III 2023, persentase tindak lanjut adalah sebesar 96,33%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp150.406.664,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 62,20% terhadap pagu anggaran sebesar Rp241.800.000,00



Gambar 38 Kegiatan Pembahasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh koordinator Reformasi. Pada tahun 2023, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya dihitung pada triwulan IV tahun 2023. Selain itu indikator kinerja ini baru di tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). aspek penilaian kelompok

khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, tanggal 6 April 2023;
- b. Pembahasan Standar Pelayanan Publik, tanggal 12 April 2023;
- c. Finalisasi Proposal Inovasi Pelayanan Publik, tanggal 13 April 2023;
- d. Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), tanggal 14 April 2023;
- e. Reviu Proposal KIPP Berdasarkan Hasil Pleno Tim KKP, tanggal 28 April 2023;
- f. Proposal KIPP Berdasarkan Hasil Pleno Tim KKP, tanggal 9 Mei 2023;
- g. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, tanggal 10 Mei 2023;
- h. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 23 Mei 2023;
- i. Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penilaian Mandiri (PEKPPP), tanggal 5-6 Juni 2023.



Gambar 39 Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

18. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	92	86	133,33	144,92	144,92	155,03	100	33,33

Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 108,7% terhadap target tahun 2023 yakni 92% atau 108,7% terhadap target triwulan III tahun 2023 yakni 92%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 yakni 86, maka capaian triwulan III tahun 2023 setara dengan 116,28%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pengumpulan data *user (email)* untuk pembuatan *user* aplikasi manajemen pengetahuan (*bitrix24*) bagi yang belum memiliki

sekaligus melakukan pembaharuan nama pegawai dalam struktur organisasi;

- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan (bitrix24) melalui: a) Penyimpanan dokumen secara *online*, b) *Polling* dan penyampaian penghargaan, c) Sirkulasi Undangan/ Pengumuman secara *online*, d) Data umum pegawai berdasarkan struktur organisasi, e) Jadwal dan hasil kegiatan, f) Disposisi, dan g) Percakapan dan komunikasi;
- c. Setiap menjelang akhir triwulan, dilakukan *warning system* kepada pejabat eselon 2, koordinator kelompok dan sub koordinator terhadap keaktifannya dalam menggunakan aplikasi bitrix24 sebagai alat penilaian IKU.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.090.015.601,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 65,51% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.663.793.000,00.

19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89	-	90	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 89 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat semesteran, sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan III tahun 2023. Angka capaian akan diperoleh melalui aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di triwulan II tahun 2023 antara lain:

- a. Telah melakukan sinkronisasi data capaian output berdasarkan realisasi dan penginputan data proyeksi/target capaian output triwulan III s.d. triwulan IV pada tanggal 26 Juli 2023 dan 5 September 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong;
- b. Telah melakukan koordinasi dengan dengan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun non fisik pada tanggal 15 Agustus 2023 di Ruang Rapat Karagenan dan 7 s.d. 8 September 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong;
- c. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2023 pada tanggal 29 Agustus 2023 di Ruang Rapat Karagenan.

d. Telah melakukan pengajuan perubahan lembar III DIPA pada tanggal 25 September 2023, pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 26 September 2023, dan telah terbit perubahan lembar III DIPA pada tanggal 29 September 2023.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp437.849.710,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 83,93% terhadap pagu anggaran sebesar Rp521.658.000,00.

20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	89	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 86 (Baik). Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dihitung pada triwulan III tahun 2023. Capaian akan diperoleh melalui Aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP telah melakukan monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 12-14 September 2023 di Bali. Kegiatan dimaksud melibatkan Seluruh Satker Ditjen PDSPKP baik pusat, UPT, maupun Dekonsentrasi dan narasumber Direktorat SPPEPP Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp617.159.994,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 83,45% terhadap pagu anggaran sebesar Rp739.514.000,00.



Gambar 40 Monitoring evaluasi capaian Kinerja Satker Dekonsentrasi

21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	80	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan update Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP. Tujuan update Rencana Umum

Pengadaan (RUP) adalah terlaksananya tertib administrasi perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tersedianya pelaporan secara online tentang perencanaan RUP Lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3-4 Agustus 2023, dan tanggal 30 – 31 Agustus 2023 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, dan diikuti oleh perwakilan seluruh unit eselon 2 Lingkup Ditjen PDSPKP serta UPT BBP3KP;



Gambar 41 Update Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong

- b. Melaksanakan pertemuan dalam rangka monitoring perkembangan pengadaan barang dan jasa Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 08 s.d. 09 Agustus 2023 di Record Center, Raiser Ikan Hias Cibinong. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang on progress, proses bidding di LPSE maupun yang sedang proses negosiasi harga pada e-katalog sectoral dan melakukan identifikasi terhadap kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp132.049.880,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 73,15% terhadap pagu anggaran sebesar Rp180.520.000,00.

22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Pada tahun 2023, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada pengukuran

pemanfaatannya. Jenis Bantuan Pemerintah yang menjadi sampling pada penilaian efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas Ditjen PDSPKP adalah Pasar Ikan, Chest Freezer, Gudang Beku, Pabrik Es dan Kendaraan Berpendingin.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Keikutsertaan rapat persiapan kegiatan evaluasi atas koordinasi persiapan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan KKP pada tanggal 19 September 2023 di Ruang Rapat Itjen GMB III KKP;
- b. Melaksanakan rapat persiapan kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 19 September 2023 di Ruang Rapat Karagenan GMB III KKP dengan agenda update pemantauan pemanfaatan Bantuan Pemerintah pada lokasi sampling;
- c. Melaksanakan rapat persiapan kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 September 2023 di Ruang Rapat Karagenan GMB III KKP dengan agenda pembahasan substansi lembar kriteria evaluasi penilaian Bantuan Pemerintah.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp257.250.125,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 36,24% terhadap pagu anggaran sebesar Rp709.934.000,00.

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektifitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal

dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023;
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Mengadakan pertemuan koordinasi terkait dengan usulan perpanjangan sewa cold storage 2000 ton pada tanggal 29 Agustus 2023 di Ruang Rapat Investasi, Gedung Mina Bahari III;
- b. Mengadakan pertemuan koordinasi terkait dengan permohonan izin penggunaan cold storage dan kerja sama program Sistem Resi Gudang (SRG) pada tanggal 21 Agustus 2023 di Ruang Rapat Pasar Ikan Modern Muara Baru Lantai 3;
- c. Mengadakan inventarisasi CS 2000 Ton pada tanggal 5 September 2023 yang dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal KKP, Direktorat Logistik, dan Sekretariat Ditjen PDSPKP sebagaimana terlampir pada Berita Acara Inventarisasi Nomor B.5332/DJPDSPKP.0/PL.760/IX/2023 tanggal 5 September 2023;
- f. Mengadakan pertemuan terkait dengan pemaparan rencana pengelolaan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru oleh PT Perikanan Indonesia pada tanggal 12 September 2023 di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III;
- g. Mengadakan pertemuan terkait dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 pada tanggal 7 s.d. 9 September 2023 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
- h. Mengadakan pertemuan terkait dengan tata cara penetapan tarif sewa pemanfaatan BMN, permasalahan Bantuan Pemerintah (BP) rusak berat yang telah diserahkan ke masyarakat, dan sinkronisasi data pengelolaan BMN pada tanggal 19 September 2023 di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III;
- i. Mengadakan pertemuan terkait dengan koordinasi dan verifikasi kelengkapan dokumen lelang pada tanggal 29 September 2023 di Ruang Rapat Akses Pasar, Gedung Mina Bahari III;

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp627.965.053,00 sampai dengan Bulan September 2023. Realisasi ini setara dengan 93,47% terhadap pagu anggaran sebesar Rp671.822.000,00.



Gambar 42 Kegiatan RKBMN Tahun 2025



Gambar 43 Pertemuan Koordinasi dengan KPKNL Jakarta II

24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP

antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Rencana Strategis Ditjen PDSPKP 2020 - 2024, Direktorat Jenderal PDSPKP menargetkan tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup pada tahun 2023 sebesar 90%. Capaian indikator kinerja ini belum bisa diketahui pada triwulan III tahun 2023, karena indikator kinerja bersifat tahunan. Berikut tabel ikhtisar pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW III 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW III 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW III 2022-TW III 2023 (%)
	Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW III 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama triwulan III 2023 antara lain:

- a. *Workshop* Satu Data Bidang PDSPKP, 6 – 8 September 2023;
- b. Melakukan kegiatan penguatan pendataan dan percepatan validasi data bidang PDSPKP di beberapa kabupaten/kota atau provinsi seperti:
 - 1) Kabupaten Gunung Kidul, 30 Agustus – 1 September 2023;
 - 2) Kota Yogyakarta, 30 Agustus – 1 September 2023;
 - 3) Provinsi Jawa Timur, 30 Agustus – 1 September 2023;
 - 4) Provinsi Sulawesi Selatan, 12-14 September 2023;
 - 5) Provinsi DI Yogyakarta, 25-27 September 2023;
 - 6) Kota Tangerang, 25-27 September 2023;
 - 7) Kota Tangerang Selatan, 25-26 September 2023.
- c. Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan satu data bidang PDSPKP, yaitu :
 - 1) Pemetaan Data Ditjen PDSPKP dan Validasi Satudata KKP, 28, 31 Juli dan 3 Agustus 2023;

- 2) Pemetaan Data Teknis Volume Produk Olahan, 8-9 Agustus 2023;
- 3) Finalisasi Pedoman Pendataan Bidang PDSPKP, 18 Agustus 2023;
- 4) Persiapan Workshop Satudata bidang PDSPKP 2023, 21 Agustus 2023;
- 5) Pemetaan Data Ditjen PDSPKP dan Validasi Satudata KKP, 22 Agustus 2023;
- 6) Validasi Harga Ikan, 24 Agustus 2023;
- 7) Finalisasi Draft Pedoman Pendataan Bidang PDSPKP Tahun 2023, 25 Agustus 2023;
- 8) Persiapan Pelaksanaan Validasi Nasional Satudata Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2023, 21 September 2023.



Gambar 44 Kegiatan Workshop Satu Data Bidang PDSPKP, 6-8 September 2023

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2023, anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola oleh Ditjen PDSPKP (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp394.726.271,00 yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Setelah adanya *Auto Adjustment* (AA) dan blokir sebesar Rp51.495.658,00 pagu anggaran Ditjen PDSPKP menjadi Rp343.230.613.000,00.

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan III Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Pusat	339.832.950.000	142.070.710.000	41,81
2	UPT	36.070.109.000	21.162.439.000	58,67
3	Dekonsentrasi	18.823.212.000	2685399000	14,27
4	Tugas Pembantuan	-	-	-
Total		394.726.271.000	165.918.548.000	42,03

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi Sampai dengan September 2023

Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan III Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	82.670.457.000	12.810.729.000	15,50
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	80.680.069.000	44.437.605.000	55,08
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	60.870.745.000	14.061.567.000	23,10
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	24.000.000.000	10.153.280.000	42,31
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	138.080.000.000	79.733.114.000	57,74
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.425.000.000	4.731.713.000	56,16
Total		394.726.271.000	165.928.008.000	42,04

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi sampai dengan September 2023

Pada triwulan III tahun 2023, penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP adalah sebesar Rp165.928.008.000,00. Realisasi ini setara dengan 42,04%

terhadap total pagu anggaran awal atau 48,34% pagu anggaran pasca AA dan blokir.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran triwulan III tahun 2023 yaitu proses pengadaan barang dan jasa gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak;
- 2) Mereviu RKAKL sesuai rencana kegiatan dan segera melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
- 3) Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melibatkan Tim Kerja Program, Tim Kerja Pengendalian Internal, serta Inspektorat Jenderal KKP dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2023 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	Rp Triliun	3,60	9,6
2	Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP*	Rp Miliar	-	8,65
3	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP*	Orang	-	49.600
4	Persentase unit kerja yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen PDSPKP	%	84	92
5	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP	Indeks	76	83,2
6	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP*	%	-	77,5
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP*	%	-	77,5

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada triwulan III tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 96,62.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP triwulan III tahun 2023, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tren penurunan harga komoditas serta kondisi global. Perlambatan ekonomi dunia dan aktivitas produksi atau industri di berbagai negara, menyebabkan permintaan global juga menurun • Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, total nilai impor produk perikanan di Amerika Serikat hingga September 2023 mengalami penurunan sebesar 20,81% dari USD 1,80 Miliar pada tahun 2022 menjadi USD 1,43 Miliar pada tahun 2023. • Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT). Beberapa kendala ekspor non-tarif antara lain adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, Chili dan Brazil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat proses penanganan hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat melalui penyampaian tanggapan <i>additional information</i> kepada pihak US. <i>Department of State</i> dan penyampaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi tersebut. • Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan. • Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan eksportasi ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi.
Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kebijakan KUR tahun 2023 yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 mengakibatkan adanya perubahan sistem, sehingga perbankan memerlukan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	untuk melakukan penataan penyaluran pembiayaannya.	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan melalui pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan


C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan III tahun 2023 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2023 antara lain :

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2023
1	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan potensi hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat melalui penyampaian tanggapan <i>additional information</i> kepada pihak US. <i>Department of State</i> dan penyampaian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi tersebut. Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan. Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan eksportasi ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi. Melakukan persiapan dan perumusan posisi dan strategi perundingan <i>Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)</i> dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan; Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran <i>seafood</i> skala internasional khususnya <i>World Seafood Shanghai Exhibition</i>; Penyelenggaraan <i>Foreign Buyer Mission</i> produk <i>seafood</i> di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Indo Fisheries Expo dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2023 di Surabaya. Indonesia. Indo Fisheries Expo & Forum 2023 adalah pameran perdagangan eksklusif berbasis bisnis ke bisnis (B2B) yang memberikan kesempatan luas untuk memantau perkembangan agrikultur dan perikanan di Indonesia. Keikutsertaan pada World Seafood Shanghai (WSS) 2023. WWS merupakan pameran perikanan yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023 di Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Melakukan pendampingan Kunjungan Buyer I. Schroeder KG (ISKG) GmbH di Indonesia
2	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan, pendampingan dan monitoring Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) sebanyak 81 personil yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Kehadiran TPUKP melalui fasilitasi Gerai Investasi dan Layanan Usaha

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2023
	<p>yang tersebar di 74 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan melalui pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan 	<p>(Gisela) turut berkontribusi pada penyaluran kredit program, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Sampai dengan triwulan III 2023, TPUKP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp28,98 milyar kepada 690 pelaku usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Rembang dan Kebumen serta pelaksanaan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI bagi pelaku usaha KP di 25 lokasi. Kegiatan identifikasi potensi akses pembiayaan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 18-20 September 2023. Kegiatan ini bertujuan menggali informasi lokasi dan calon debitur potensial untuk pengembangan klaster-klaster pembiayaan di Kabupaten Pekalongan yang menjadi lokus prioritas KKP sebagai Kampung Perikanan Budidaya Nila Salin. Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Bank BNI pada tanggal 25 Juli 2023, Bank BRI pada tanggal 25 Agustus 2023, dan PT. PNM pada tanggal 23 Agustus 2023, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan data KUSUKA KKP. Rapat Kerja Teknis Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) 2023 dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Agustus 2023 di Solo, dalam rangka evaluasi kinerja TPU KP semester I dan perencanaan kegiatan semester II 2023, peningkatan pemahaman TPU KP tentang program prioritas KKP, dan meningkatkan softskill TPU KP dalam pendampingan usaha.
3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun non fisik Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan sinkronisasi data capaian output berdasarkan realisasi dan penginputan data proyeksi/target capaian output triwulan III s.d. triwulan IV pada tanggal 26 Juli 2023 dan 5 September 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong; Telah melakukan koordinasi dengan dengan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun non fisik pada tanggal 15 Agustus 2023 di Ruang Rapat Karagenan dan 7 s.d. 8 September 2023 di Raiser Ikan Hias, Cibinong; Telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2023 pada tanggal 29 Agustus 2023 di Ruang Rapat Karagenan. Telah melakukan pengajuan perubahan lembar III DIPA pada tanggal 25 September 2023,

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2023
		pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 26 September 2023, dan telah terbit perubahan lembar III DIPA pada tanggal 29 September 2023.



Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Cedung Mina Bahari III Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juli 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,35
2	Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,77
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Nasional	3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	57,61
4	Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,10
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	58
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	9,6
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	8,65
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	49.600
5	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,25
6	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	33,5
		11.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	4
		12.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,1
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	83,2
		14.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80,5
		15.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen	≤0,5

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		PDSPKP	
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	75
		17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	75
		18. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	89
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	77,5
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP(%)	77,5
		24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	90

Data Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.000)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	148.575.814
-	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	79.380.069
-	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	60.870.745
-	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	101.844.186
-	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	24.000.000
-	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	77.844.186
3	Program Dukungan Manajemen	138.080.000
-	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	138.080.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		388.500.000

Jakarta, 24 Juli 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo